

**MENGGKRITISI PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI
INDONESIA MENGGUNAKAN PEMBAGIAN
MODEL KURIKULUM FINNEY
(Sebuah Tinjauan Filsafat)**

F. Widya Kiswara ^{i*)}

Abstrak : Perubahan kurikulum di Indonesia sudah dilakukan berkali-kali sedang Vinney hanya menggolongkan kurikulum menjadi empat macam. Empat macam penggolongan Vinney didasarkan pada filsafat yang melatarbelakangi kurikulum itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, perubahan kurikulum yang berkali-kali di Indonesia apakah berdasar kajian filsafat tertentu. Makalah ini belumlah menjawab filsafat pendidikan mana yang cocok untuk Indonesia tetapi makalah ini hanya melihat apakah ada dasar filsafat yang cukup kuat yang mendasari perubahan kurikulum di Indonesia. Dari hasil analisa, perubahan kurikulum sudah didasari oleh filsafat tertentu. Sayangnya ideologi pengajarannya belum sering dipengaruhi oleh kepentingan sempit tertentu. Makalah ini juga merekomendasikan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk melihat hal-hal yang mempengaruhi kurikulum di Indonesia agar bisa mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam UUD1945.

Kata-kata Kunci : Kurikulum, Model Kurikulum Finney

^{1*)} Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pendidikan UNY (S3) dan penulis buku pelajaran bahasa Inggris untuk TK, SD, SMP dan SMA yang diterbitkan PT Erlangga, Jakarta.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia sudah berumur lebih dari 65 tahun dan dalam jangka waktu tersebut bangsa Indonesia sudah berganti-ganti kurikulum. Tercatat ada tujuh kali pergantian kurikulum. Berganti-gantinya kurikulum ini mengindikasikan berubahnya tujuan pendidikan, pendekatan dan bahannya. Sangatlah menarik untuk mencermati hal-hal yang menyebabkan perubahan kurikulum di Indonesia, apakah substansial ataukah karena alasan praktis dan politis semata. Apakah perubahan

yang terjadi sejalan dengan pergeseran filsafat yang dianut oleh bangsa kita sebagaimana dipaparkan oleh Vinney?

Dalam tulisannya yang berjudul *The ELT Curriculum: A Flexible Model for a Changing World*, Denise Finney secara segregatif membagi dan mengelompokkan model kurikulum pendidikan menjadi empat. Model-model itu adalah *the content model*, *the objective model*, *the process model* dan yang terakhir *the mixed focus curriculum model* (Finney, 2002: 70-77). Model yang pertama didasari filsafat *Classical Humanism* atau *Perennialism*, model yang kedua berdasar pada *Reconstructionism*, yang ketiga berlatar belakang filsafat *Progressivism* dan yang terakhir berdasarkan filsafat *New Pragmatism*.

Tulisan Finney ini menarik untuk digunakan untuk mengkritisi perubahan kurikulum karena dua hal pokok. Yang pertama, Finney mendasarkan pengelompokan model kurikulum secara segregatif dan yang kedua karena ia mendasarkan pengelompokan berdasarkan landasan filsafat yang mempengaruhinya bukan berdasarkan *approach* sebagaimana yang terjadi dalam perkembangan sejarah pengajaran bahasa Inggris (Richards; 2005:3) atau dalam mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua, menurut Finney model kurikulum yang baru muncul sebagai reaksi kekurangan model pertama dan seterusnya. Artinya kurikulum berkembang karena berkembangnya filsafat yang dipakai masyarakat dalam rangka mencoba merespon kebutuhan sekarang dan masa datang.

Dari pengertian di atas, filsafat sebagai dasar penyusunan kurikulum merupakan sesuatu yang ideal karena filsafat selalu membicarakan apa itu ilmu, bagaimana mendapatkan ilmu itu dan apa sumber-sumbernya, serta melihat nilai-nilai yang ingin dituju. Ornstein & Daniel (1985; 185) mengatakan bahwa filsafat akan menjawab pertanyaan pendidikan itu apa, bagaimana persekolahan harus dijalankan, dan bagaimana pengajaran harus dijalankan. Dewey (1916) yang dikutip Netty (2008) mengatakan bahwa *phylosophy may even be defined as general theory of education*. Karena pentingnya filsafat untuk pendidikan, kurikulum pun dikembangkan berdasarkan suatu filsafat tertentu. Bahwasannya, kurikulum sebagai input dari supra sistem pendidikan (Banathy; 1970) tentu saja tidak lepas dari aliran

filsafat yang menjadi dasar hidup manusia yang menjalankan sistem pendidikan itu sendiri.

Kurikulum pendidikan di Indonesia secara resmi muncul pada tahun 1947 dengan nama Rencana Pembelajaran 1974, kemudian disusul Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 2004 dan terakhir KTSP 2006. Ada sinyalemen bahwa kurikulum berganti mengikuti pergantian menteri yang menangani bidang kependidikan, namun tentu saja pendapat seperti ini hanyalah berupa asumsi yang bukan berdasarkan kajian empiris ilmiah. Ada pula yang mengatakan bahwa kurikulum berubah karena situasi sosial politik masyarakat negara ini berubah. Yang jelas, kurikulum berubah berdasarkan kebutuhan, meskipun harus dikritisi kebutuhan mana yang menyebabkan perubahan kurikulum. Kalau asumsi bahwa perubahan kurikulum menjawab kebutuhan yang paling mendasar atau hakiki, apakah kurikulum pendidikan di Indonesia ini sudah berdasar pada filsafat tertentu? Filsafat apa yang melatarbelakangi munculnya kurikulum di Indonesia?

Makalah ini berusaha untuk mengkritisi perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan menggunakan pembagian kurikulum menurut Finney dan melihat fungsi filsafat dalam pengembangan kurikulum. Tujuannya adalah untuk melihat apakah perubahan kurikulum di Indonesia didasarkan oleh perubahan filsafat yang dianut atau karena faktor lain. Filsafat apa yang melatarbelakangi perubahan kurikulum di Indonesia? Harapannya, dengan mengkritisi model kurikulum menurut Finney dan melihat perkembangan kurikulum di Indonesia penulis mempunyai konstruksi yang cukup kuat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum di Indonesia.

B. Empat model kurikulum menurut Finney

Sebagaimana sudah dibahas dalam pembukaan, Finney membuat empat model kurikulum berdasarkan dasar filsafatnya. Nampaknya Finney menempatkan filsafat sebagai titik dasar pengembangan kurikulum sebagaimana dikemukakan oleh Dewey yang dikutip oleh Netty Yushani Yusof (2008). Pandangan-pandangan

filsafat itu nampak jelas membangun komponen-komponen dalam setiap model kurikulumnya.

Model yang pertama adalah *content model* atau model yang mendasarkan pada isi pengetahuan itu sendiri, yang didasarkan pada filsafat Humanisme Klasik atau dalam bukunya Ornstein & Levine disebut *Perennialism* (1985: 193). Titik sentral model kurikulum ini adalah isi yang harus diajarkan atau ditransfer kepada para peserta didik (Finney, 2002:71). Dalam tradisi filsafat Humanisme Klasik ini, isi/*content* bersifat adiluhung dan mempunyai kontribusi yang besar untuk perkembangan intelektual siswa. Pengetahuannya bersifat universal, tidak berubah dan mutlak. Hasil yang diharapkan dari peserta didik adalah bahwa mereka bisa berpikir secara efektif, bisa mengkomunikasikan jalan pikirannya dan bisa membedakan nilai-nilai yang ada. Dalam pengajaran bahasa Inggris model kurikulum ini diterapkan dalam *grammar-based curriculum* karena kurikulumnya sangat berpusat pada tata bahasa dan kosa katanya. Karena bahasa Inggris dirasa sebagai sesuatu yang adiluhung maka tidak ada toleransi untuk kalimat yang salah.

Menurut Ornstein & Levine (1985: 193) kecenderungan filsafat perennialisme ini hanya mengembangkan intelektualitas manusia. Kalau kita hubungan dengan pendidikan bahasa Inggris, model pertama yang diajukan Finney ini juga mengandalkan pemahaman teori dan kosa kata. Assessment yang dilakukan lebih ditujukan untuk melihat apakah peserta didik membuat kalimat dengan grammar yang tepat atau tidak. Akibatnya konteks penggunaannya tidak tepat dan tujuan dari pembelajaran bahasa sendiri tidak tercapai (Finney, 2002:71).

Model yang kedua adalah model yang menekankan pada aspek tujuan (*objectives model*). Filsafat yang mendasarinya adalah filsafat *reconstructionism*, yang mempunyai tujuan yang jelas yaitu tercapainya perubahan sosial. Bahkan Ornstein dan Levine (1985:205) mengatakan bahwa filsafat ini harus bisa membentuk komunitas tatanan kehidupan yang baru. Finney mengatakan bahwa pemikiran dasar terapan filsafat *reconstructionism* dipengaruhi kaum behavioris. Pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku yang bisa dilihat dan diukur. Untuk itu dalam model kurikulum yang seperti ini mengenal istilah *performance indicator*, *learning objectives*, dan *performance objectives*.

Menurut Finney, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Tujuan pendidikan harus jelas baik untuk guru maupun peserta didik, sehingga mempermudah memilih materi dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, adalah ketersediaan evaluasi. Kalau tujuan pendidikan jelas, kesuksesan peserta didik, dan kesuksesan program dapat diukur secara akurat untuk mengukur apakah tujuan yang ada sudah terpenuhi atau belum. Yang ketiga adalah akuntabilitas program. Untuk meningkatkan akuntabilitas, suatu program harus memiliki *need analysis* yang bagus untuk menentukan tujuan pembelajaran dan untuk menentukan produk-produk pendidikan yang bisa diukur.

Kelly (1989) sebagaimana dikutip oleh Ornstein dan Finney (2002) mengatakan bahwa kelemahan model ini adalah berkurangnya tingkat autonomi peserta didik sehingga bisa mempengaruhi *self fulfilment* (tingkat pemenuhan diri) dan perkembangan individu. Ketika pendidikan hanya mencoba mencapai tujuan, proses dan perkembangan individu kurang dihargai. Lebih jauh, Kelly mengatakan bahwa model ini hanya cocok untuk sekolah kejuruan, yang lebih banyak mengajarkan skills.

Model yang ketiga disebut Model Proses. Model ini lahir karena model sebelumnya tidak begitu mengakomodasi proses dan mendasarkan pada filsafat *progressivism*. Tujuan akhirnya untuk memungkinkan seseorang mencapai pemenuhan diri / *self-fulfilment*. Model ini mementingkan perkembangan pemahaman bukan penerimaan pengetahuan secara pasif. Titik berat terletak pada proses dan prosedur di mana peserta didik mengembangkan pemahaman dan kesadaran dan memungkinkan seseorang untuk belajar demi masa depannya. Murid menjadi pusat dalam proses pembelajaran, karena para pendidik yang *progressive* melihat bahwa pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan dan ketertarikan peserta didik (Ornstein & Livine, 1985: 202).

Dalam skala nasional, model ini kurang begitu menarik dibandingkan dengan model sebelumnya yaitu *Objective Models* karena di banyak negara sekolah kejuruan lebih banyak karena lulusannya menjawab kebutuhan tenaga kerja. Model ini menuntut waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya untuk menjamin

proses-proses yang dilaksanakan benar-benar bisa mendekatkan peserta didik pada pencapaian tujuan.

Model yang ke empat adalah *a mixed-focus curriculum*, atau kurikulum dengan fokus campuran. Dalam pengajaran bahasa Inggris, model ini lebih mengarah pada pendekatan terintegrasi dengan tetap mendasarkan pada peserta didik sebagai pusat dan mencoba mengkombinasikan model kedua (orientasi produk) dan model ketiga (orientasi proses). Menurut Johnson yang dikutip Finney (2002), ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kebijaksanaan terutama dalam menentukan tujuan kurikulum; sisi pragmatis dalam menentukan sesuatu yang memang bisa diwujudkan; dan orang-orang yang mengambil keputusan.

C. Dinamika kurikulum di Indonesia

Setelah kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai menyusun rencana pendidikannya. Rencana-rencana itu diwujudkan dalam bentuk kurikulum yang secara diterapkan dan diimplementasikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Karena perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, kurikulum di Indonesia pun beberapa kali mengalami perubahan. Ada 7 kali pergantian kurikulum di Indonesia, dari Rencana Pembelajaran tahun 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 2004, dan KTSP 2006.

1. Rencana Pelajaran 1947

Kurikulum ini masih sangat dipengaruhi eforia kemerdekaan Indonesia. Kisi-kisi pendidikannya bersifat politis dengan mencoba mengubah dari orientasi pendidikan Belanda ke orientasi pendidikan Nasional. Asas pendidikannya Pancasila. Bentuk berupa daftar mata pelajaran dan jam pikiran serta garis-garis besar pengajaran. Tujuannya adalah mengurangi pendidikan yang bersifat kognitif dan mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, dan materi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Secara resmi, kurikulum ini berlaku pada tahun 1950.

2. Rencana Pelajaran Terurai 1952

Fokus kurikulum ini adalah pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya dan moral. Karena ada lima aspek pengembangan kurikulum ini disebut Pancawardhana. Mata pelajaran yang ada dijelaskan secara terinci. Pada tahun 1964 pemerintah berusaha menyempurnakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Untuk itu perubahannya disebut Rencana Pendidikan 1964 dengan tujuan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik.

3. Kurikulum 1968

Kurikulum ini merupakan pengembangan Kurikulum 1964 dengan penekanan pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Pembelajaran ditujukan untuk mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Sayangnya perubahan ini banyak diwarnai muatan politis karena ada perubahan pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Ada kelemahan yang mendasar yaitu penekanan pada pencapaian kognitif dan kaitan dengan permasalahan riil tidak begitu kuat.

4. Kurikulum 1975

Kurikulum ini ditujukan untuk membuat pendidikan lebih efektif dan efisien. Perubahan ini dilatarbelakangi MBO (*Management by Objectives*) yaitu menekankan pada tujuan pendidikan. Dalam kurikulum ini dikenal adanya PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Setiap satuan pelajaran dirinci dari TIU, TIK sampai pada materi pelajaran, alat, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Dengan sistem seperti ini guru banyak dibebani pembuatan rencana pengajaran.

5. Kurikulum 1984

Kurikulum ini menggunakan pendekatan proses yaitu menekankan proses dalam mencapai tujuan. Siswa didudukkan sebagai person yang aktif (subyek) untuk berproses dalam rangka menguasai materi yang diberikan. Model pembelajaran yang dipakai adalah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau SAL (*Student Active Learning*). Dalam prosesnya, guru banyak tidak siap untuk menjadi sumber dan

siswa dibiarkan aktif di kelas dan kurang mendapat pendampingan yang memadai. Akibatnya kegaduhan kadang tidak terkontrol.

6. Kurikulum 1994

Kurikulum ini mencoba menggabungkan kurikulum yang berbasis tujuan (kurikulum 1975) dan kurikulum yang berbasis proses (1984). Sebenarnya penggabungan ini cukup ideal namun pada praktiknya siswa terbebani apalagi kurikulum ini ditambah dengan muatan-muatan lokal sehingga kurikulum ini terasa menjadi sangat padat.

Ketika era reformasi menggantikan Orde Baru muncul Suplemen Kurikulum 1999. Suplemen ini hanya berupa tambal sulam dari kurikulum 1994 sehingga tidak banyak membuat perubahan.

7. Kurikulum 2004

Kurikulum 2004 lebih populer disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tujuan dari kurikulum ini adalah siswa menguasai kompetensi-kompetensi yang sudah dicantumkan dalam kurikulum. Untuk mengukur kompetensi ini diperlukan berbagai macam metode assessment, salah satunya test. Namun dalam praktiknya, yang banyak digunakan adalah test. Dengan demikian kompetensi tidak bisa diukur dengan baik.

8. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006)

Setelah ujicoba KBK dihentikan, tahun 2006 ditetapkanlah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tujuannya adalah menjawab tuntutan kemajuan jaman dengan menciptakan lulusan yang kompeten sesuai dengan potensi lokal yang ada. Kurikulum ini merespon perubahan sistem pemerintahan yang diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. KTSP disusun dan digunakan oleh satuan pendidikan.

Meskipun dalam banyak hal kurikulum ini masih sama dengan KBK namun ada beberapa hal yang menjadi pemahaman khusus KTSP antara lain 1) menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, 2) berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman, 3) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, 4) sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar

lainnya yang memenuhi unsur edukatif, 5) penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

D. Analisa perkembangan dan pengembangan kurikulum di Indonesia

Kalau kita cermati dari tujuannya, Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pelajaran 1954 dan Kurikulum 1968 dibuat berdasarkan filsafat *Classical Humanism* atau *Perennialisme* sekaligus filsafat Idealism. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur yang harus diwariskan kepada anak didik. Menurut kaum idealis nilai-nilai luhur bersifat hierarkis. Dalam Rencana Pelajaran 1947 yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat dan materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Pendidikan merupakan proses intelektual yang menanamkan ide-ide sebagai kesadaran dalam diri anak didik dan sekolah merupakan agen sosial di mana peserta didik menemukan dan menerima kebenaran (Ornstein & Levine, 1985: 190).

Menurut penggolongan Finney, Kurikulum 1975 merupakan model kurikulum berbasis tujuan yang mendasarkan filsafatnya pada *Social reconstructionism*. Untuk bisa merubah keadaan sosial perlu ditekankan perencanaan yang baik, untuk itu perlu indikator-indikator untuk mengukur tujuan dan dan penilaian. Namun karena tuntutan yang sangat berat bagi guru untuk mempersiapkan semua hal, justru mereka terlalu sibuk dengan persiapan pembelajarannya. Akibatnya rekonstruksi sosial tidak bisa berjalan dengan maksimal dan ada kecenderungan guru menuntaskan tugas persiapan secara formalitas.

Dengan model CBSA atau SAL kurikulum 1984 bisa kategorikan dalam *process model* pembagian Finney (ibid, 73-74). Model kurikulum yang menitik beratkan pada proses didasarkan pada filsafat *progressivism*. Seharusnya kurikulum dengan model ini menganut empat aspek, yaitu 1) peserta didik bebas berkembang secara alamiah, 2) interes yang dipengaruhi oleh pengalaman pertama seharusnya menjadi stimulus pembelajaran, 3) guru harus menjadi nara sumber dan pembimbing di dalam aktivitas kelas, dan 4) harus ada kerja sama antara sekolah dan rumah. Sayangnya, ketika kurikulum ini dijalankan guru belum siap menjadi

nara sumber, dan ketika anak harus aktif mencari pemahaman sendiri kegiatannya tidak terarah dan menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Kurikulum tahun 1994 merupakan perpaduan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dengan mengedepankan tujuan dan proses. Menurut Finney (ibid: 74-75) kurikulum ini merupakan pencampuran fokus. Idealnya tujuan tercapai dengan tetap mengedepankan proses yang dialami secara individual. Namun dalam kenyataannya, proses dalam pendidikan tidak selalu bisa berjalan dengan cepat. Ketika proses menjadi prioritas yang sangat penting tetapi materi ajar masih banyak maka sulit kemungkinan tujuan akan tercapai. Maka ada kecenderungan untuk melarikan diri ke penguasaan kognitif dan proses akhirnya dinomorduakan.

KBK dan KTSP nampaknya tidak masuk dalam model yang diusulkan oleh Finney. Kedua kurikulum ini lebih mendasarkan pada *performance*, bukan sisi kognitif. Ada kecenderungan kedua kurikulum ini berdasar pada filsafat *post modernism* ataupun *constructivism*. Model ini mensyaratkan peran aktif peserta didik karena menurut post modernis dan konstruktivis, realitas merupakan konstruksi manusia. Pengetahuan merupakan hasil interaksi antara pikiran kita dan pengalaman (Beck, 1993). Kita memaknai pengalaman menggunakan konstruksi atau mental model kita (Boyett & Boyett, 1998: 89). Sebagai akibatnya, pengetahuan kita selalu berubah selaras dengan pengalaman dan pemahaman sebelumnya. Basis filsafat ini menyebabkan suatu metode tertentu untuk pengajarannya. Metode inquiry banyak digunakan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian, diskusi dan pelaporannya agar peserta didik secara aktif menkonstruksi pengetahuannya. Tokoh yang banyak mempengaruhi teori pendidikan dalam KBK dan KTSP adalah Vygotsky, Piaget dan Brunner (Suparno, 1997). Kelemahan model ini adalah masih berlakunya Ujian Nasional yang menggunakan pilihan ganda. Jenis test seperti ini tidak bisa menggambarkan konstruksi seseorang dengan tepat.

Dari analisa ini, kita melihat bahwa pada dasarnya kurikulum yang ada di Indonesia ini berdasarkan suatu filsafat tertentu. Penguatan filsafat yang ada menyebabkan munculnya suatu ideologi pengajaran. Sayangnya, ideologi ini sering dikalahkan oleh sistem kekuasaan dan pragmatisme sempit sehingga kebijaksanaan

pendidikan Indonesia, termasuk dalam mengembangkan kurikulumnya, banyak yang tidak menghasilkan dengan lebih baik.

Filsafat harus kita dudukkan pada posisi yang sangat penting, yaitu berpikir kritis tentang alam raya dan tentang tempat tempat kita didalamnya, memaknai ulang dengan sikap keterbukaan dan penghargaan, dan menyelidiki secara kritis hasil-hasil abstrak agar bisa mencapai gambaran yang menyeluruh (Hamersma, 2008: 71). Soedjiarto (2008) mengatakan bahwa dengan tinjauan kritis filsafat tujuan pendidikan dan materi-materi pendidikan akan bisa ditentukan sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu masyarakat.

Perlu diadakan analisa kebutuhan untuk titik pijak yang sangat mendasar dalam penyusunan kurikulum (Finney, 2002: 75). Soedjiarto (2008: 122) menambahkan bahwa dengan adanya kajian mendasar tentang kebutuhan ini akan ditemukan perkembangan peradaban dan perlunya orang muda untuk melanjutkan peradaban itu. Kajian yang berupa analisa kebutuhan itu bisa mencakup kajian sempit (yang berorientasi pada produk) dan kajian luas (yang berorientasi pada proses).

Analisa kebutuhan dan kajian filsafat akan menghasilkan kurikulum yang berbobot dan bisa menjawab kebutuhan peradaban yang sedang akan berlangsung. Imam Barnadib menegaskan bahwa telah terjadi keyakinan dalam lingkungan ahli pendidikan tentang adanya kenyataan bahwa pendidikan itu saling terkait dengan filsafat. Dalam banyak hal, pendidikan perlu berlandaskan pada konsep tertentu yang perumusannya diambil dari filsafat (Banadib; 1996:10).

E. Filsafat Pendidikan Indonesia

Dalam persiapan seminar nasional Ilmu Pendidikan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 di Universitas Negeri Yogyakarta, penulis mengajukan pertanyaan mungkinkah kita memiliki filsafat pendidikan Indonesia sebagai salah satu sesi yang harus dijawab oleh Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., Ed. Pertanyaan ini muncul dari kegalauan bagaimana meningkatkan peran pendidikan di Indonesia yang belum kunjung menuai sukses sehingga cita-cita pendidikan yang menurut Soejiarto (2008) menciptakan manusia Pancasila.

Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., Ed. mencoba menjawab pertanyaan yang penulis ajukan dengan mengutip bukunya *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Ia memulai dengan membahas harkat dan martabat manusia yang bisa dideskripsikan dalam tiga bagian yaitu dimensi kemanusiaan, pancadaya dan hakikat manusia (Prayitno; 2009: 20-30). Kakekat manusia harus dilihat secara komprehensif sehingga menjangkau seluruh aspek perkembangan dan kehidupannya, yaitu aspek-aspek jasmani-rohani, pribadi-sosial, material-spiritual, dunia-akhirat hubungan manusia dengan alam dan penciptanya. Hakikat manusia seperti itu dilandasi kondisi manusia sebagai makhluk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, paling indah dan sempurna, paling tinggi derajatnya, khalifat di muka bumi dan pemilik hak-hak asasi manusia.

Keseluruhan kemanusiaan manusia membentuk harkat dan martabat manusia yang didalamnya terkandung, komponen hakikat manusia, komponen dimensi kemanusiaan (kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan), dan komponen pancadaya (daya taqwa, cipta, karsa, rasa dan karya). Harkat dan martabat yang meliputi tiga komponen itu menurut Prof. Dr. Prayitno, M.Sc.,Ed merupakan jati diri kemanusiaan manusia Indonesia. Jadi, pendidikan tidak lain adalah upaya memuliakan kemanusiaan manusia untuk mengisi dimensi kemanusiaan dengan orientasi hakikat kemanusiaan melalui pengembangan pancadaya secara optimal dalam rangka mewujudkan jati diri manusia sepenuhnya.

Driyarkara yang memandang pendidikan sebagai proses humanisasi dan hominisasi menekankan hakekat manusia dan eksistensi manusia. Karena pendidikan merupakan pembentukan manusia muda sehingga dia merupakan keseluruhan yang utuh, sehingga ia secara psikologis merupakan satu intergrasi maka perlu disadari eksistensi manusia itu sendiri (1980:34). Perlu dilihat bagaimana manusia Indonesia mengartikan dunianya, sehingga manusia Indonesia akan mampu memajukan dunianya (Indonesia).

Sedikit berbeda dengan Prayitno, Driyarkara tidak hanya berangkat dari hakekat manusia secara universal tetapi ia menekankan aspek lokalitas, manusia dalam budaya setempat. Dengan demikian filsafat pendidikan yang dibangun

menyangkut aspek lokalitas, manusia yang tumbuh dalam budaya tertentu. Manusia tumbuh dan menumbuhkan budaya di mana dia hidup dan dihidupi.

Paula Sauko (2003) dalam bukunya *Doing Research in Cultural Studies* mengusulkan tiga obyek material yang harus diteliti untuk memahami praktik dan filsafat pendidikan. Yang pertama adalah *lived experience*, yaitu pengalaman orang-orang yang terlibat. Yang kedua adalah *discourse* atau teks-teks yang mempengaruhi konstruksi seseorang. Misalnya, ketika yang disebut kesuksesan belajar adalah nilai yang baik, bisa diterima di perguruan tinggi ternama dan bisa bekerja di tempat yang memberi gaji tinggi teks ini akan mempengaruhi seseorang untuk menentukan pendidikannya. Yang ketiga adalah *context* yaitu struktur-struktur yang membelenggu pemikiran seseorang. Ketika hasil UN masih mendominasi penentuan lulus tidaknya seseorang, maka akan ada kecenderungan untuk mementingkan nilai dalam mengukur tingkat keberhasilan pendidikan.

Nampaknya kalau 3 obyek material penelitian yang diusulkan Paula Sauko ini akan banyak membantu dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan metode yang diusulkan oleh Sauko ini orang akan bisa memahami kenapa penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi tidak berjalan dengan mulus terutama karena ada peraturan dari pemerintah untuk menggunakan UN/test sebagai penentu kelulusan atau keberhasilan pendidikan. Padahal, test tidak mungkin mengukur tingkat kompetensi seseorang. Dengan melihat 3 obyek material ini diharapkan pertanyaan siapa manusia Indonesia itu, untuk apa mereka harus belajar, dan bagaimana mereka harus belajar akan bisa terjawab dengan baik.

F. Penutup

Model Kurikulum yang sudah dibuat Finney menunjukkan betapa filsafat berperan besar dalam penyusunan kurikulum. Filsafat selalu memberi pemahaman pengetahuan itu apa, bagaimana cara mencapainya dan nilai-nilai yang perlu dijunjung tinggi. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, filsafat sudah kelihatan perannya namun dalam tingkat implementasi konstruksinya bisa kembali menjadi sempit. Untuk itu, sebelum penyusunan suatu kurikulum kita perlu mengadakan analisa kebutuhan dan berpikir dengan dasar filsafat agar tercipta

pemahaman-pemahaman yang mendasar tentang perkembangan masyarakat dan kebutuhan pendidikannya sehingga akan tercapai kejelasan konstruksi pendidikannya. Selain itu, perlu pengawalan agar kebijaksanaan yang diambil bisa diimplementasikan sampai ke tingkat teknis operasional.

Perlu untuk digali filsafat Pendidikan Indonesia agar pendidikan di Indonesia sesuai dengan hakekat manusia Indonesia. Dengan demikian, melalui pendidikan yang tertuang dalam kurikulumnya manusia Indonesia bisa menjadi manusia yang berkembang secara penuh. Pendidikan dan filsafat pendidikan harus bisa memenuhi tuntutan UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang mengatakan bahwa pendidikan diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, Clive. 1993. Postmodernism, Pedagogy, and Philosophy of Education diunduh dari http://www.ed.uiuc/EPS/PES-Yearbook/93_docs/BECK.HTM
- Driyarkara. 1980. Driyarkara tentang Pendidikan. Yogyakarta: Kanisius
- Dubin, F., & Olshtain, E. (1986). *Course Design*. New York: Cambridge University Press.
- Finney, Denise. 2002. The ELT Curriculum: A Flexible Model for a Changing World dalam *Methodology in Language Teaching* (Richards & Renandya ed). NY: CUP
- Hamersma, Harry. 2008. Pintu Masuk ke Dunia Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Netty Yushani Yusof. 2008. The Importance of Phylosophy for the Curriculum Makers. Diunduh dari <http://soyberly.com/education/the-importance-of-philosophy-to-curriculum-makers/> pada tanggal 10 Januari 2011-01-23
- Ornstein, Allan & Levine, Daniel. 1985. *An Intruduction to the Foundations of Education* . Boston: Houghton Mifflin Company.
- Prayitno. 2009. Dasar Teori dan Praksis Pendidikan. Jakarta: Grasindo
- Paula Sauko. 2003. *Doing Research in Cultural Studies*. London: Sage Publications Ltd.
- Soedjiarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Suparno, Paul. 1997. *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius

